

RINGKASAN

Proses Validasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pada KPPN Semarang I, Mi'rotin Ivanasari, Nim D42200606, Tahun 2024, 110 hlm, Akuntansi Sektor Publik, Bisnis, Politeknik Negeri Jember, Endro Sugiartono, S.E., M.M. (Dosen Pembimbing Magang). Laporan magang ini dibuat untuk memberikan gambaran mengenai hasil pekerjaan yang sudah dilakukan selama magang berlangsung dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr., Ak). Adapun tujuan khusus dari laporan ini yaitu dapat menjelaskan “Proses Validasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pada KPPN Semarang I”.

Politeknik Negeri Jember adalah salah satu perguruan tinggi vokasi, dimana dalam proses pembelajarannya lebih banyak praktikum dibandingkan dengan teori. Pelaksanaan magang dilaksanakan selama 800 jam yang dimulai sejak tanggal 01 September 2023 hingga tanggal 31 Desember 2023 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I. KPPN Semarang I selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdiri dari beberapa seksi, salah satunya yaitu seksi Verifikasi dan Akuntansi (Vera) sesuai dengan PMK Nomor 262/PMK.01/2016 yaitu mempunyai tugas melakukan verifikasi dokumen pembayaran dan rekonsiliasi data laporan keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 menyatakan bahwa bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran Satuan Kerja (Satker) wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada KPPN selaku Kuasa BUN. Proses validasi LPJ bendahara yang semula menggunakan aplikasi SPRINT beralih ke aplikasi SAKTI dengan tujuan menyederhanakan proses penyusunan dan penyampaian LPJ, menyederhanakan alur validasi LPJ bendahara oleh KPPN.

Proses validasi LPJ dimulai dari bendahara pengeluaran satker membuat LPJ dan di sampaikan kepada KPPN melalui SAKTI. Pelaksana seksi dan kasi vera yang ada di KPPN melakukan pengecekan terhadap LPJ bendahara pengeluaran. LPJ bendahara pengeluaran yang telah sesuai dan lengkap akan dilakukan proses validasi oleh pelaksana dan kasi vera. Validasi yang dilakukan yaitu melalui aplikasi SAKTI, yang nantinya setelah proses validasi telah selesai satker akan mengirimkan *hardcopy* LPJ yang telah tervalidasi tersebut ke KPPN untuk di tandatangani oleh kasi KPPN dalam hal ini adalah kasi seksi vera. Apabila LPJ terdapat kesalahan maka pelaksana akan melakukan penolakan validasi LPJ dan harus diperbaiki oleh bendahara pengeluaran. Kendala yang sering dihadapi pada proses validasi LPJ adalah dokumen yang tidak lengkap, uang tunai yang belum dibulatkan, serta adanya kesalahan pada nota penerimaan negara. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, KPPN Semarang I diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada satker untuk dapat meminimalisir kesalahan pada saat proses validasi LPJ.